BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan Demokrasi saat ini telah menjadi pilihan yang terbaik di dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat melalui indikator demokrasi. Salah satu indikator demokrasi adalah instrumen politik bagi pemimpin yang mempengaruhi suatu negara/daerah dipilih secara langsung oleh rakyat.Melalui sistem demokrasi yang berada di tangan rakyat, artinya penentuan pemimpin dipilih melalui mekanisme pemilihan secara langsung oleh rakyat dengan melihat makna sistem demokrasi tersebut, maka pemerintah dan legislatif melakukan perubahan pada -Undang. Diantara Undang-Undang yang melakukan perubahan adalah konstitusi (UUD 1945) Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 “Kedaulatan Berada Ditangan Rakyat Dan Dilaksanakan Menurut Undang-Undang Dasar". Artinya Pelaksana kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh sebuah lembaga negara, yaitu MPR, tetapi oleh berbagai lembaga yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berangkat dari pasal 1 ayat 2 tersebut, maka Undang-Undang Pemda dan Undang-Undang PILKADA mengikuti Undang-Undang diatasnya, sehingga saat ini pelaksanaan PILKADA dilaksankan secara langsung oleh rakyat. Pada UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah jelas ditentukan bahwa kewenangan untuk memilih dan mengangkat Kepala Daerah berada di tangan DPRD. Akhirnya, dengan keluarnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah, Menyatakan bahwa pemilihan Kepala Daerah akan dilaksanakan secara langsung

oleh rakyat yang diharapkan dapat menghadirkan kepemimpinan daerah yang demokratis, yakni bersih, jujur, anti KKN dan bertanggung jawab atau lazib disebut *good governance,* muara dari seluruhnya adalah kesejahteraan dan keadilan sosial.

Mekanisme perubahan sistem politik tersebut, harus di sertai oleh tingkat partisipasi politik masyarakat yang sehat. Contoh Partisipasi masyarakat dalam bentuk konvensional merupakan lawan dari partisipasi politik masyarakat yang tidak sehat atau disebut bentuk non konvensional. merupakan perangkat penting karena teori demokrasi yang menyebutkan bahwa perlunya partisipasi politik masyarakat pada dasarnya disebabkan bahwa masyarakat tersebutlah yang paling mengetahui apa yang mereka kehendaki. Dalam pengertian partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan Negara dan masyarakat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah *(public policy),* kegiatan yang mencakup tindakan seperti pemberian suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai politik dan kelompok kepentingan lainnya.

Untuk melihat kecenderungan partisipasi masyarakat dalam pemberian suara ada beberapa pendekatan yang dilihat menurut Almond (dalam Suryadi, 2007: 133), yang menunjukan macam-macam partisipasi politik yang terjadi di berbagai negara dan berbagai waktu. Kegiatan politik “konvensional” adalah bentuk partisipasi politik yang “normal” dalam demokrasi modern. Bentuk “non konvensional” termasuk beberapa yang mungkin legal (seperti petisi) maupun

yang ilegal, penuh kekerasan dan revolusioner. Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integrasi kehidupan politik dan kepuasan atau ketidakpuasan warga negara. Kegitan politik konvensional sudah terlihat pada masyarakat kecamatan dengilo walaupun itu kegitan yang mendasar seperti pemberian suarah (voting) diskusi politik dan kegitan kampanye. Namun tidak semua masyarakat melakukan kegiatan tersebut masih ada di antara mereka yang acuh serta tidak begitu peduli terhadap kegitan politik berupa pemberian suara dan kampanye,

Huntington dan Nelson (dalam Rush, 2009:185) menemukan bentuk-bentuk partisipasi politik, meliputi: (1) Kegiatan Pemillihan, mencakup suara, juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seoranng calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan. (2) Lobbying, mencakup upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan politik mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPUD Kabupaten Pohuwato ditetapkan bahwa masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya untuk menentukan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati berjumlah 96.065 orang. Jumlah ini terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 48.598 orang, sementara perempuan sebanyak 47.467 orang yang terdiri dari 13 Kecamatan dan 104 Desa yang ada di Kabupaten Pohuwato. Khususnya untuk masyarakat kecamatan Dengilo terdapat 4.164 orang dimana 3.416 (83,11%) masyarakat menggunakan

hak pilihnya, 703 (16,89%) masyarakat yang Golput. Hasil tersebut menjelaskan bahwa perilaku masyarakat dalam berpartisipasi dalam menjatuhkan pilihannya kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati masih cukup memperihatinkan hal ini karena masih banyak angka Golput (Golongan Putih) yaitu 16,89% atau 703 orang.

Dalam pelaksanaannya PILKADA di Kabupaten Pohuwato berlangsung satu putaran dengan 3 pasang calon. Dimana pasang Cabup dan Cawabup nomor urut pertama adalah Syarif Mbuinga dan Amin Haras memperoleh 52835 Suara (66,87%) yang di usung oleh partai Demokrat, PPP, PAN, PKS, PDIP, dan PKB. Untuk nomor urut ke Dua adalah Mulyadi Panigoro dan Sarwan Laduhu memperoleh 1501 Suara (1,90%)yang di usung oleh partai Gerindra serta PBB. Dan untuk pasang Cabup dan Cawabup nomor tiga adalah Salahudin Pakaya dan Burhan Mantulangi sebagai pasangan calon independen memperoleh 24670 Suara (31,23%). Dari hasil suarah sah 77.621 (100%) bahwa suara terbanyak dimiliki oleh Syarif Mbuinga dan Amin Haras yang di usung oleh partai Golkar, Demokrat, PPP, PAN, PKS, PDIP, dan PKB adalah sebanyak 52835 (66,87%) suara yang memilih pasangan tersebut.

Bila dilihat angka partisipasi politik masyarakat di kecamatan dengilo kabupaten pohuwato pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di atas, angka partisipasi masyarakat dapat dikatakan sudah sangat baik hal ini ditujukan tingkat partisipasi pemberian suara, maencapai angka 83.11% atau 4164. Namun permasalahan pada tingkat partisipasi tersebut masih ada masyarakat tidak menggunkan hak pilih (golput) sejumlah 16,89% atau 703 orang data tingkata

partisipasi politik pada pilkada diatas menunjukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat kecamatan dengilo kabupaten pohuwato masih rendah mendapat perhatian pemerintah daerah dan kpud kabupaten pohuwato untuk di naikan lagi tingkat partisipasinya.artinya sekalipun tingkat partisipasinya sudah pada angka 83.11% dan yang paling utama bagaimana pemerintah daerah kabupaten pohuwato dan KPUD kabupaten pohuwato. meminimalisasi angka golput di kecamatan dengilo kabupaten pohuwato.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberian Suara Pada Pemilukada di Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemberian suara Pada Pemilukada di Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemberian suara Pada Pemilukada di Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Partisipasi masyarakat dalam pemeberian suara Pada Pemilukada di Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemberian suara Pada Pemilukada di Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis;

   penelitian ini sebagai salah satu kajian politik dan pemerintahan, terutama berkaitan dengan orientasi politik dan perilaku politik.

2. Secara Praktis

   a. Bagi Peneliti; Hasil penelitian ini dapat menambah informasi dan pengetahuan tentang bagaimana partisipasi masyarakat Pada Pemilukada di Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato.

   b. Bagi partai politik dan kandidat; Agar mereka lebih meningkatkan pendidikan politik yang baik dan benar melalui seminar-seminar dan kegiatan politik yang bisa berorintasi pada masyarakat.